

**INTEGRASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA
DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
SISWA KELAS VII DI MADRASAH TSANAWIYAH LOMBOK KULON
WONOSARI BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS **Oleh :** ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD **Muhammad Ferli** SIDDIQ
JEMBER
NIM : T20189041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JUNI 2024**

**INTEGRASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA
DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
SISWA KELAS VII DI MADRASAH TSANAWIYAH LOMBOK KULON
WONOSARI BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial



Oleh:

Muhammad Ferli
NIM: T20189041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R



Muhammad Eka Rahman S.Pd M. SEI
NIP. 198711062023211016

**INTEGRASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA
DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
SISWA KELAS VII DI MADRASAH TSANAWIYAH LOMBOK KULON
WONOSARI BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan dan Sains
Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Juni 2024

Ketua Penguji



Dr. Nuruddin, M.Pd.I
NIP. 197903042007101002

Sekretaris



Noyita Nurul Islami, M.Pd.
NIP. 198711212020122002

Anggota:

1. Dr. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I.
2. Muhammad Eka Rahman, M.SEI.



J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. H. Abd. Mu'is, S.Ag. M.Si.
NIP. 197304242000031005

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Asy-Syura : 38).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan rendah hati, karya ini saya dedikasikan sebagai ungkapan perjuangan pribadi kepada Allah SWT atas semua kebahagiaan, kekuatan, dan ketabahan yang telah diberikan dalam menjalani kehidupan, serta sebagai penghormatan kepada :

1. Almarhumah Ibu Enni dan dan Bapak Moh. Muhlisan. Untuk almarhumah Ibuku maaf jika anakmu ini prosesnya tidak sama seperti anak yang lain sedikit terlambat dalam hal apapun, karna semenjak ibu meninggalkan ku, jalan yg kulalui sangatlah terjal dan curam bu, tapi Alhamdulillah sedikit demi sedikit aku bisa melewati semua sampai pada titik ini, terimakasih bu telah mendidik ku dengan penuh kasih sayang maaf aku tidak bisa membalas semua jasmu.
2. Kakak saya yakni mas Moh. Imron. Beliau adalah kakak tersayang saya yang selalu memberi semangat kepada saya sampai detik ini untuk mewujudkan impian bapak saya agar saya menjadi sarjana dan bisa membanggakan kedua orangtua. Tanpa kakak saya saya tidak bisa berada di titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha Esa, yang atas rahmat, dan karunianya, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Siswa Kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso” ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa kesuksesan peneliti dalam penulisan skripsi ini diperoleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag.,M.M.,CPEM. Selaku rector UIN KHAS Jember, yang telah memberikan fasilitas dan layanan dengan baik kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Abdul Mu'is, S.Ag, M.,Si. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN KHAS Jember, yang sudah memberikan motivasi dan ilmunya selamma proses menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hartono, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sains yang telah memberikan fasilitas serta kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Fiqru Mafar, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial UIN KHAS Jember, yang telah memperlancarkan proses persetujuan dan penyelesaian skripsi.

5. Muhammad Eka Rahman S.Pd M. SEI selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang sudah sabar, telaten, dan ikhlas dalam membimbing penelitian saya dari awal hingga penelitian dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan beserta karyawan yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi.
7. Imamudin, S. Pd, I. selaku kepala MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso yang sudah memberikan izin dan sangat membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akhirnya, penulis memohon maaf terhadap segala kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi peneliti, umumnya untuk orang-orang yang membaca skripsi ini.

Jember, 23 Mei 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R **MUHAMMAD FERLI**
T20189041

ABSTRAK

Muhammad Ferli. (T20189041). “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa Kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso”.

MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso memiliki visi yaitu Berprestasi, Berbudi, Berbudaya, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Tentunya nilai-nilai yang terdapat pada budaya demokrasi sangat penting bagi pihak pendidik di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah.

Fokus dari penelitian ini yakni 1) Bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso? 2) Bagaimana implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso?

Tujuan dari penelitian ini yakni 1) Untuk mendeskripsikan cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso 2) Untuk mendeskripsikan implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yangmana dalam mengumpulkan data dari teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian ini yakni 1) Cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso yakni sila pertama guru mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS, yaitu mengetahui sejarah UUD 1945, sila kedua yaitu adil dan beradab mengajarkan mengenai pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sila ketiga mengajarkan tentang sumpah pemuda, sila keempat mengajarkan mengenai sejarah pemilu 1966, paradigma dasar bagi pembangunan politik dan pemerintahan nasional, prinsip musyawarah mufakat, perwakilan, gotong royong, serta daulat rakyat (kerakyatan), yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi secara global, sila Kelima mengajarkan tentang resolusi PBB terhadap rakyat Palestina dan peluncuran BLT. 2) implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso yakni setelah mempelajari IPS lebih memahami mengenai sejarah yang berkaitan dengan bangsa Indonesia yang menjadikan dan mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.

DAFTAR ISI

Uraian	Hal.
COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25
1. Demokrasi Pancasila	25
2. Pembelajaran IPS.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	45
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Tahap-Tahap Penelitian	48
H. Tahap Pelaksanaan Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis	52
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Tabel Keorisinalitas Penelitian	23
4.1	Hasil Temuan	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

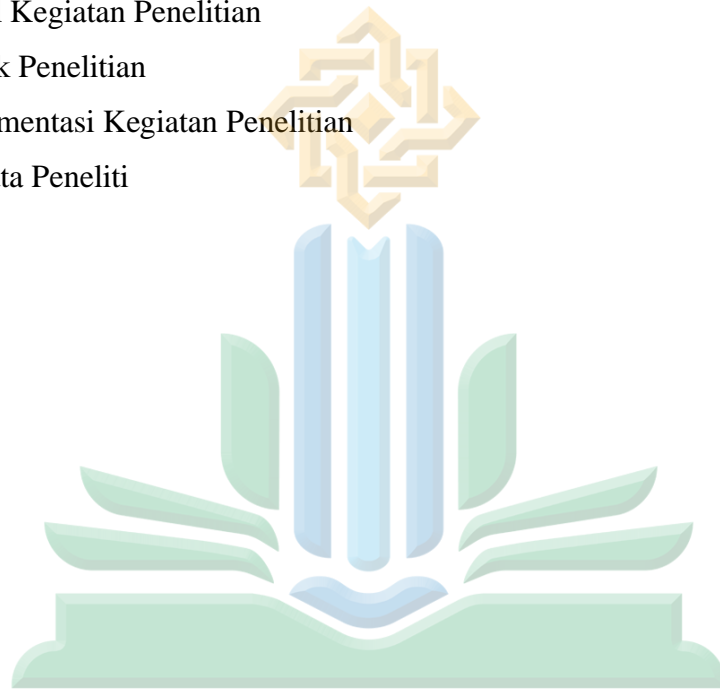
No.	Uraian	Hal.
4.1	Peneliti Meriview Pembelajaran Sejarah 1945	55
4.2	Wawancara dengan Siswa.....	58
4.3	Siswa Piket Kelas.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Penelitian
3. Kalender Akademik
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Matrik Penelitian
8. Dokumentasi Kegiatan Penelitian
9. Biodata Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia diketahui sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Penyusunan naskah UUD 1945 itu sendiri juga dilakukan secara demokratis. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”² Untuk membentuk warga negara yang demokratis, memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter maka diperlukan pendidikan.

Pendidikan wajib memegang beberapa prinsip yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan multimakna.³

Pendidikan adalah suatu proses menaburkan benih-benih budaya dan peradaban manusia yang hidup dan dihidupi oleh nilai-nilai atau visi yang

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat 1.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: PT Armas Duta Jaya, 2005).

berkembang dan dikembangkan dalam suatu masyarakat.⁴ Pendidikan dan kebudayaan berkenaan dengan sesuatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai.

Nilai adalah norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasa berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang kearah yang lebih kompleks.⁵

Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional yang menjelaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶

Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya peserta didik perlu mengetahui tentang nilai-nilai demokrasi. Sebagai anggota masyarakat suatu bangsa dan negara, menjadi warga negara yang demokratis merupakan suatu keharusan bagi setiap individu. Masing-masing individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Kehidupan masyarakat yang demokratis ialah memandang bahwa setiap warga negara mempunyai tingkat kesetaraan yang sama, tidak membedakan latar belakang sosial dan saling toleransi antar warga negara. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi ini merupakan salah satu

⁴ Tilaar. Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 78

⁵ Hidayat Dudung Rahmat. Hakikat dan Makna Nilai. (Bandung: Alfabeta, 2006), 7.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: PT Armas Duta Jaya, 2005).

cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Nilai-nilai demokrasi merupakan cita-cita bangsa dan negara, tapi juga tak jarang masih ada juga masyarakat yang melanggar nilai-nilai demokrasi yang berlaku khususnya di Indonesia.

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak luput dari pelanggaran yang terkait pada pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Menurut Klaten, beberapa pelanggaran yang terjadi terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi yaitu, tindakan diskriminasi pada suatu oknum tertentu, kebebasan berekspresi, tindakan kekerasan, adanya geng klitih bocil yang seperti ada di kabupaten Jember saat ini, kasus dan tindakan intoleran. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, akan tetapi dilakukan pula oleh elit-elit pemerintahan serta aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum bisa mewujudkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupan sehari-hari.⁸

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mampu bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai demokrasi, salah satunya diupayakan melalui proses pendidikan. Upaya tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yang diaplikasikan ke pakse keolah. Sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara demokrasi pada lingkungan sekolah akan mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik dan berperan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.

⁷ Septi Dewi Susanti, *“Integritas Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta”*, (Universitas Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2017), 2.

⁸ Effendi, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 68.

Nilai-nilai demokrasi dapat diajarkan melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, salah satunya melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang juga bisa menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Pembelajaran IPS yang secara formal mulai diberlakukan dari jenjang sekolah dasar sampai SMA, dituntut untuk mampu memediasi pengembangan dan pelatihan potensi siswa secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan transformasi, budaya, nilai-nilai dan norma sosial.⁹ Budaya demokrasi sangat menghargai persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia.

Dalam budaya demokrasi dikembangkan bagaimana manusia harus saling menghormati keberagaman yang telah menjadi kondratnya. Di samping itu, demokrasi juga menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara manusia. Budaya demokrasi terbentuk karena nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan dan dihayati sebagai sikap dan perilaku hidup. Nilai-nilai demokrasi menurut pendapat Zamroni yaitu: kebebasan, hak-hak individu, toleransi tujuan bersama percaya diri.¹⁰ Nilai-nilai demokrasi merupakan salah satu nilai yang tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai demokrasi memiliki tempat yang sesuai dalam proses pembelajaran, karena proses pembelajaran memerlukan suasana dan lingkungan yang demokratis.

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia tentu tidak luput dari pelanggaran yang terkait pada pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Maka dari

⁹ Soemantri. Menggagas pembaharuan pendidikan IPS, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 82.

¹⁰ Zamroni. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 93.

itu nilai-nilai yang terdapat dalam budaya demokrasi harus dijaga dan diperkenalkan terutama kepada generasi muda. Salah satunya melalui jalur pendidikan, karena tugas lembaga pendidikan seperti sekolah bukan hanya mengajar untuk menjadikan siswa pintar dan cerdas dalam hal pengetahuan, melainkan juga mendidik yang berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupannya. Nilai – nilai demokrasi bersumber dari Pancasila karena Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia. Yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.

Secara konstitusional rumusan demokrasi Pancasila berpedoman kepada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Rumusan tersebut mendeskripsikan, bahwa demokrasi Pancasila digali dari kultur dan adat masyarakat Indonesia, sehingga demokrasi Pancasila itu merefleksikan demokrasi asli bangsa Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri dari demokrasi yang dipahami oleh masyarakat Barat. Dengan demikian, Pancasila merupakan jiwa dari sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, tiap-tiap sila dalam Pancasila menjadi dasar bagi demokrasi Indonesia.¹¹ Pelajar Pancasila adalah salah satu dari tujuan yang perlu dicapai dalam pendidikan Indonesia. Pelajar Pancasila dapat dibina dalam mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran strategis sebagai sarana mewujudkan generasi penerus yang memiliki wawasan kebangsaan dan global dari amanah yang ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun

¹¹ Montoha, 1998, “*Hukum dan Kekuasaan Suatu Kajian Fiqh Siyasah*”, dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed), *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). 122-123.

2003. Pelajar Pancasila mempunyai enam karakter di mana keenam karakter perlu terinternalisasi dalam diri serta sikap peserta didik. Pelajar Pancasila mempunyai lima profil sebagai berikut :¹²

1. Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
2. Berkebhinekaan
3. Gotong Royong
4. Mandiri
5. Bernalar Kritis

Menerapkan nilai-nilai demokrasi pancasila yang baik di lingkungan sekolah pastinya tidaklah mudah, harus didukung oleh semua warga sekolah salah satunya adalah pentingnya peran seorang guru dalam mengajar di dalam ataupun di luar kelas. Dan salah satu mata pelajaran yang relevan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Melalui mata pelajaran IPS siswa diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, tanggung jawab, dan menjadi warga dunia yang cinta damai.¹³ Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan dengan membiasakan diri setiap warga sekolah untuk dapat bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan, membentuk organisasi-organisasi sekolah, saling menghargai dan menghormati keberadaan individu maupun kelompok yang ada di sekolah.

¹² M. Nursa'ban, dkk, "Buku Panduan Guru IPS Untuk SMP Kelas VII, Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Sosial", (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan : Jakarta, 2021), 6.

¹³ Zamroni, *Meningkatkan Mutu Sekolah*, (Jakarta : PSPA Muhammadiyah, 2007), 65

Hal tersebut dijelaskan pula oleh Rahmah bahwa, peran penting pembelajaran IPS yaitu membangun identitas nasional serta menjadikan siswa yang kreatif, mampu memecahkan masalah sendiri dan lingkungannya serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Dengan terciptanya warga negara yang memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang demokratis diperlukan juga keterlibatan aktif siswa yang mana akan menanamkan pada nilai-nilai demokrasi maupun ide-ide demokrasi dalam pembelajaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek pengetahuan.¹⁴

Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan sosial yang berisikan konsep pengalaman belajar yang diorganisir dalam ilmu sosial secara psikologis dan ilmiah. Secara akademis akan mengantarkan kearah positif dengan terciptanya warga negara yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional, dalam menciptakan sistem sekolah yang dapat mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki kepedulian sosial dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya (the public good citizenship).¹⁵

Berikut yakni hasil wawancara pra-lapangan dengan Kepala MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso yakni Bapak Imron :

“Ya kami sangat menanamkan sikap demokratis dalam sekolah ini. Jadi diusahakan tidak ada pertikaian hidup guyup rukun, aman dan tentram. Selain itu sikap demokratis ini juga tertuang dan dipelajari pada

¹⁴ Rahmah.H, *Pengembangan Profesi Pendidikan IPS*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 108.

¹⁵ Wahidmurni, *Metodologi Pembelajaran IPS Pengembangan Proses Pembelajaran IPS di Sekolah atau Madrasah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 18.

pembelajaran IPS kelas VIII agar lebih mendarah daging pada siswa kami. Pembelajaran demokrasi ini ada di kelas VII dan VIII. Kalau kelas VII nya lebih ke materi dmokrasi pancasila. Nanti saya beri bukunya.”¹⁶

Berdasarkan observasi pra penelitian yang dilakukan di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso peneliti menemukan bahwa, MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso merupakan salah satu sekolah swasta yang lumayan baik bagi masyarakat Bondowoso dan sekitarnya, karena MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso juga sering mengikuti berbagai acara serta sering mendapat juara dalam lomba tingkat kabupaten sampai nasional. MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso memiliki visi yaitu Berprestasi, Berbudi, Berbudaya, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Tentunya nilai-nilai yang terdapat pada budaya demokrasi sangat penting bagi pihak pendidik di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah.¹⁷ Pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada materi demokrasi pancasila yang sedang di pelajari oleh kelas VII.

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hubungan antara Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan nilai-nilai demokrasi dengan mengambil judul “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Siswa Kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso”.

¹⁶ Bapak Imron, selaku kepala sekolah MTs Lombok Kulon, 10 November 2023.

¹⁷ Observasi, MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso, 10 November 2023.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso?
2. Bagaimana implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso.
2. Mendeskripsikan implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori pembelajaran mengenai nilai-nilai demokrasi sehingga dapat menambah kajian pembelajaran IPS yang berkaitan dengan demokrasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sedikit membantu sekolah mengenalkan, menanamkan, menumbuhkan, mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi pada siswa serta dapat membantu menjaga dan melestarikan budaya demokrasi pancasila melalui pendidikan.

b. Bagi Guru

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif dan bisa membantu memberi informasi kepada guru mengenai nilai-nilai demokrasi pancasila pada mata pelajaran IPS serta dapat membantu para guru meningkatkan kompetensi dan menambah kreatifitas dalam mengajar terutama dalam pembelajaran IPS.

c. Bagi peserta didik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik dan untuk lebih mengetahui dan menambah wawasan tentang nilai-nilai demokrasi pancasila. Serta diharapkan nantinya peserta didik sebagai penerus bangsa dapat terus terbiasa hidup berdemokrasi.

d. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap penelitian yang sejenis yang sudah pernah diadakan sebelumnya. Dan juga penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

e. Bagi pengamat peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai proses pengenalan dan pendalaman terhadap budaya demokrasi pancasila.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini mengambil judul “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Pembelajaran IPS siswa kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso” Berdasarkan judul tersebut maka istilah yang digunakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Integrasi

Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.¹⁸

Secara harfiah integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan.¹⁹

Integrasi menurut Sanusi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007), 437.

¹⁹ Zainal Abiding Bagir, *Integrasi Ilmu Dan Agama*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 201.

jalanan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu.²⁰ Istilah integrasi ini dapat dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan penyatuan dua unsur atau lebih yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, nama jenis dan sebagainya.

2. Nilai-Nilai

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.²¹

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, gabungan dua kata *demoscratos* (demokrasi) atau *demos-cratein* memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.²² Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat, setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya dalam

²⁰ Novianti Muspiroh, Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA, Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. Xxviii No. 3. 2013/1435.

²¹ Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1435

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: PT Armas Duta Jaya, 2005)

berpolitik.²³ Sedangkan Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴ Maka bisa disimpulkan demokrasi pancasila adalah suatu bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat, setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya dalam tidak hanya dalam hal berpolitik. Pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial sesuai dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Pembelajaran

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran¹¹ adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka

²³ Arbi Sanit, "*Partai, Pemilu dan Demokrasi*", (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997). 62.

²⁴ Miriam Budiardjo, Edisi Revisi Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 83.

maupun secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.²⁵

Menurut Syaiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan peserta didik menggunakan azas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah yaitu mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.²⁶

5. Pendidikan IPS

Pendidikan IPS merupakan studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diintegrasikan untuk tujuan membentuk kompetensi kewarganegaraan. IPS disekolah menjadi suatu studi secara sistematis dalam berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, politik, psikologi, agama, dan sosiologi, sebagaimana yang ada dalam ilmu-ilmu humaniora, bahkan termasuk matematika, dan ilmu-ilmu alam dapat menjadi aspek dalam IPS.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini, maka hasil akan disusun menjadi bab dan subbab. Agar format penulisan sistematika pembahasannya jelas dan lengkap seperti:

²⁵ Rusman, *Model-model Pembelajaran mengembangkan profesional guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3-134.

²⁶ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabexta, 2005), 61.

²⁷ Sapriya, *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 10.

BAB I Pendahuluan, merupakan awalan atau dasar dalam penelitian yang berisi latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Fungsi dari Bab ini yaitu untuk memberi gambaran awal kepada pembaca mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini merupakan ringkasan yang berisi kajian terdahulu, dan kajian teori. Pada bab ini dipaparkan perbedaan jenis atau hasil penelitian dari beberapa referensi yang dipilih oleh penulis. Kajian teori pada bab ini akan menjadi pijakan dari judul pembahasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, isi dari bab ini yaitu memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, merupakan inti dari proses penelitian ini, dalam bab ini berisi tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V yakni Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan integrasi nilai-nilai demokrasi dengan tujuan untuk melihat persamaan, perbedaan kajian sebagai bahan telaah peneliti untuk menghindari pengulangan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini, seperti skripsi yang ditulis oleh :

1. Septi Dewi Susanti mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul skripsi “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta” yang dipublish pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta; 2) nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah guru IPS, kepala sekolah dan siswa. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada: 1) proses

pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta tidak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Hal ini karena dalam pelaksanaan proses pembelajaran tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi yang terdiri dari menyelesaikan pertikaian secara damai, menyelesaikan persoalan secara damai, berpartisipasi dalam proses politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakan keadilan (persamaan) dan memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi); 2) Nilai-nilai demokrasi yang terdiri dari menyelesaikan pertikaian secara damai, menyelesaikan persoalan secara damai, berpartisipasi dalam proses politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakan keadilan (persamaan), serta memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi) tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta.²⁸

2. M. Toha Mu'id mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi "Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS di Kelas VIII SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk" yang dipublish pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu, (1). Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi yang bisa ditanamkan pada siswa melalui pembelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 1 Wilangan Kab Nganjuk (2). Untuk mengetahui cara menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS di kelas VIII

²⁸ Septi Dewi Susanti, "Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta", Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

SMP Negeri 1 Wilangan Kab Nganjuk, (3). Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 1 Wilangan Kab Nganjuk. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dengan mengumpulkan data mengenai penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran di kelas VIII SMP Negeri 1 Wilangan, kendala dalam proses pembelajaran serta upaya untuk mengatasi kendala pada proses pembelajaran. Data yang dikumpulkan melalui metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 1 Wilangan diantaranya adalah nilai-nilai kebebasan berpendapat, toleransi, percaya diri, kebebasan berkelompok, kerjasama (teamwork), (2). Nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 1 Wilangan dapat ditanamkan melalui metode siswa aktif, metode keteladanan, metode live in, metode penjernihan nilai, metode diskusi, 18arad jawab, ceramah, penugasan, dan demonstrasi, (3). Faktor pendorong dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS, yaitu: a). Sarana prasarana. Sarana prasarana, b). Pendidik, c). Budaya sekolah. Sedangkan Faktor penghambatnya yaitu: a). Pendidik mengalami kesulitan dan kurang teliti dalam menentukan

nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan materi, b). keterbatasan waktu pembelajaran c). Motivasi yang kurang dari peserta didik.²⁹

3. Asbar mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar” di publis tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan demokrasi pada mata pelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar (2) Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penghambat pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar dan (3) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung pada implementasi pendidikan demokrasi dalam proses pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 19aradigm19e19c. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Takalar. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X IPS 1 SMA Negeri 6 Takalar. Sampel penelitian ini yaitu kelas X IPS1. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pendidikan Demokrasi Pada Mata Pelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar sudah terimplementasikan dengan baik dengan

²⁹ M. Toha Mu'id, “*Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS di Kelas VIII SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan yaitu toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan yang dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, 20 arad jawab, Dan penugasan, (2) Faktor-Faktor Pendukung Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar yaitu Sarana dan Prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, Laptop, dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran, dan (3) Faktor-Faktor Penghambat Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar yaitu Perbedaan individual, perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.³⁰

4. Siska Pratama mahasiswa UIN Lampung, dengan Judul skripsi “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran di Kelas V SDN 03 Negeri Batin Kec Blambangan Umpu, Kab Way Kanan”. Penelitian ini berawal dari kurang diimplemetasikannya nilai-nilai pancasila dalam proses pembelajaran. Seperti yang penulis lihat di sekolah tersebut bahwa masih ada peserta didik yang belum melakukan pembiasaan diri apa yang telah diterapkan disekolah. Peserta didik kurang menerapkan nilai-nilai pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa,

³⁰ Asbar, “*Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar*” Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), kurangnya kesadaran peserta didik untuk berdo'a sebelum memulai pembelajaran, masih ada peserta didik yang melakukan bullying, masih ada peserta didik yang kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, kurangnya pengawasan yang ada sehingga peserta didik masih melakukan pelanggaran. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai pancasila dalam proses pembelajaran di kelas V SDN 03 Negeri Batin, Kec Blambangan Umpu Kab Way Kanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berperan di SDN 03 Negeri Batin, Kec Blambangan Umpu, Kab Way Kanan. Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, Guru wali kelas 5, dan peserta didik di kelas 5 di SDN 03 Negeri Batin. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam proses pembelajaran (pendahuluan, inti dan penutup).³¹

5. Fadillah, dkk mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul "Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS Sub Pokok Pluralitas (Studi Kasus di SMP Islam Terpadu Nuurusshidiq Kota Cirebon) dipublis tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk

³¹ Siska Pratama, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran di Kelas V SDN 03 Negeri Batin Kec Blambangan Umpu, Kab Way Kanan", Skripsi : UIN Lampung, 2020.

mendeskripsikan tentang penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS sub pokok pluralitas di kelas VIII SMP Islam Terpadu Nuurusshidiiq Kota Cirebon. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi, cara penanaman nilai-nilai demokrasi, faktor pendorong dan penghambat nilai-nilai demokrasi, serta mengintegrasikan strategi nilai-nilai demokrasi dalam sistem pendidikan, terutama pada aspek pembelajaran di kelas VIII SMP Islam Terpadu Nuurusshidiiq Kota Cirebon. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode study kasus. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi telah ditanamkan dengan baik dalam pembelajaran IPS. Nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dengan baik diantaranya nilai toleransi, nilai kebebasan berkelompok, nilai kebebasan berpendapat, kerjasama dengan sesama, percaya diri. Cara penanaman nilai-nilai demokrasi dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, di luar kelas dan demonstrasi. Faktor pendorong penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS adalah pendidik, sarana prasarana, dan budaya di sekolah. Faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS adalah alokasi waktu dan kurangnya motivasi dalam diri siswa.³²

³² Fadillah, dkk, *“Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS Sub Pokok Pluralitas (Studi Kasus di SMP Islam Terpadu Nuurusshidiiq Kota Cirebon)”*, Skripsi : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022, 75.

Dari penelitian terdahulu diatas bisa diringkas perbedaannya dan persamaannya pada tabel berikut, agar bisa diketahui keorisinalitasannya :

Tabel 2.1
Tabel Keorisinalitasan Penelitian

No	Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Septi Dewi Susanti, “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pada fokus pembahasan hanya membahas tentang nilai-nilai demokrasi 2. Lokasi 3. Tingkatan kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kualitatif 2. Pembelajaran IPS di SMP 3. Membahas nilai-nilai demokrasi
2	M. Toha Mu'id, “Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS di Kelas VIII SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pada fokus pembahasan hanya membahas tentang nilai-nilai demokrasi 2. Lokasi 3. Tingkatan kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kualitatif 2. Pembelajaran IPS di SMP 3. Membahas nilai-nilai demokrasi
3	Asbar, “Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pada fokus pembahasan hanya membahas tentang nilai- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kualitatif 2. Pembelajaran IPS di SMP 3. Membahas nilai-nilai demokrasi

	IPS di SMA Negeri 6 Takalar” Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.	<ul style="list-style-type: none"> 1. nilai demokrasi 2. Lokasi 3. Tingkatan kelas. Terdapat pada fo 	
4	Siska Pratama mahasiswa UIN Lampung, dengan Judul skripsi “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran di Kelas V SDN 03 Negeri Batin Kec Blambangan Umpu, Kab Way Kanan”, 2020.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pada fokus pembahasan hanya membahas tentang nilai-nilai demokrasi 2. Lokasi 3. Tingkatan kelas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kualitatif 2. Pembelajaran IPS di SMP 3. Membahas nilai-nilai demokrasi
5	Fadillah, dkk, “Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS Sub Pokok Pluralitas (Studi Kasus di SMP Islam Terpadu Nuurusshidiiq Kota Cirebon), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pada fokus pembahasan hanya membahas tentang nilai-nilai demokrasi 2. Lokasi 3. Tingkatan kelas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kualitatif 2. Pembelajaran IPS di SMP 3. Membahas nilai-nilai demokrasi

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini dengan sebelumnya memiliki persamaan yakni terletak pada pendekatan penelitian

yakni menggunakan metode kualitatif dan terdapat pada fokus pembahasan yakni membahas tentang nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran IPS di sekolah menengah pertama. Sedangkan perbedaan serta keterbaruannya yakni terletak pada fokus yang mana pada penelitian ini peneliti akan berfokus tidak hanya pada integrasi nilai-nilai demokrasi saja melainkan demokrasi pancasila yang akan dibahas pada penelitian ini. Kemudian perbedaan yang lain yakni pada pembelajaran IPS yang mana diterapkan oleh guru di MTs Lombok Kulon Wonosari yakni dikaitkan dengan Nilai demokrasi pancasila dan guru tidak menggunakan buku dan berinovasi sendiri untuk mengajar dikelas. Implementasinya yakni dalam setiap sila akan dikaitkan oleh guru dalam pembelajaran IPS seperti sejarah UUD 1945, dan lain sebagainya pada setiap sila.

B. Kajian Teori

1. Integrasi nilai-nilai demokrasi

Integrasi dalam banyak bidang keilmuan diartikan secara kasar sebagai suatu bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan klasifikasinya berdasarkan konsep, paradigma, dan unit. Tetapi secara etimologi integrasi memiliki banyak pengertian, dalam kamus *Oxford* integrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *integrate* (verb) yang berarti *combine something in such a way that it becomes fully a part of somethings else* (menggabungkan sesuatu sedemikian rupa sehingga sepenuhnya menjadi bagian dari sesuatu yang lain), Menjadi *integrated* yang memiliki makna *with various parts fitting well together*

(mencocokkan sesuatu yang sama dengan baik) dan menjadi integration yang memiliki makna integrating or being intergrated.³³

Sedangkan dalam kamus Cambridge integrasi berasal dari kata *integrate* (verb) yang berarti *to mix with and join society or a group of people, often changing to suit their way of life, habits and costumes* (bergaul, bersama dan bergabung dengan masyarakat atau sekelompok orang, yang sering berubah sesuai cara hidup mereka, baik itu berupa adat kebiasaan dan pakaian), dan berubah menjadi integration (noun) yang berarti *racial* atau *cultural integration*.³⁴

Dalam kamus Collins Cobuild integrasi berasal dari kata *integrate* yang berarti *into a social group, they mix with people in that group* (menjadi sebuah kelompok sosial, mereka berbaur dengan orang-orang dalam kelompok itu), sedangkan *integrated* berarti *combaine them (things or person) that they are closely linked or so that they form one thing* (menggabungkan sesuatu benda atau orang sehingga mereka berhubungan erat atau supaya mereka membentuk satu hal yang lain).³⁵

Jadi dari uraian beberapa arti dari kata integrasi di atas, secara garis besar kata integrasi memiliki makna pembauran, menyatukan, memadukan dan menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mana berbeda dari bentuk asalnya menjadi

³³ A.P. Cowie ed. , Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford; Oxford University Press, 1994), 651-652.

³⁴ Elizabeth Waker, et. al. ed. , Cambridge Advanced Learner's Dictionary (Cambridge; Cambridge University Press, 2008), 751.

³⁵ John Sinclair. et. al. ed. , Collins Cobuild: English Learner's Dictionary (Fulham; Harper Collins Publisers, 1994), 499.

sesuatu yang baru. Sedangkan secara terminologi, dalam ilmu-ilmu sosial, seperti dalam kamus sosiologi integrasi berarti salah satu masalah kekal sosial masyarakat bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan, bagaimana mereka berintegrasi dengan satu sama lain.

Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS dapat diartikan sebagai usaha untuk menggabungkan nilai-nilai demokrasi ke dalam proses pembelajaran IPS untuk mengenalkan nilai-nilai demokrasi dan diharapkan dapat memperoleh kesadaran mengenai nilai-nilai demokrasi serta menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam tingkah laku. Pendidikan nilai-nilai demokrasi pancasila menurut Hill adalah mengantar siswa mengenali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai, moral dan keyakinan agama untuk memasuki kehidupan budaya zamannya. Proses pendidikan nilai dilaksanakan dengan mengetahui nilai-nilai, menginternalisasi dan melaksanakan pada perbuatan. Pendidikan nilai terintegrasi kedalam mata pelajaran.³⁶

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Pengertian demokrasi menurut Ubaedillah secara etimologis terdiri dari dua kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, gabungan dua kata *demos-cratos* (demokrasi) atau *demos-cratein* memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Setiap individu

³⁶ Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Konstruktivistikme Dan VCT sebagai inovasi Pendekatan Pembelajaran Aktif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 70.

memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya dalam berpolitik.³⁷

Demokrasi menjamin hak setiap orang dalam kehidupan berpolitik. Demokrasi adalah suatu kondisi dalam tertib politik di suatu negara yang mencakup dua dimensi yaitu perlombaan dan peran serta. Peran serta warga suatu negara menjadi hal yang penting dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi menjadi pilihan politik Indonesia sejak lahirnya sebuah negara dan dinilai sebagai metode politik pemerintahan yang sempurna.³⁸

Menurut Schumpeter demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Kemampuan untuk memilih pemimpin inilah yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi merupakan suatu cara dalam kegiatan politik dengan mengedepankan suara bersama tidak pada salah satu pihak saja.³⁹

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.⁴⁰

³⁷ Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Demokrasi "Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani"*, (Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2011)1, 36.

³⁸ Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*. (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), 8.

³⁹ Effendi, *Demokrasi dan Demokratisasi "Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 1.

⁴⁰ Cholisin & Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 101.

Secara konstitusional rumusan demokrasi Pancasila berpedoman kepada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Rumusan tersebut mendeskripsikan, bahwa demokrasi Pancasila digali dari kultur dan adat masyarakat Indonesia, sehingga demokrasi Pancasila itu merefleksikan demokrasi asli bangsa Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri dari demokrasi yang dipahami oleh masyarakat Barat. Dengan demikian, Pancasila merupakan jiwa dari sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, tiap-tiap sila dalam Pancasila menjadi dasar bagi demokrasi Indonesia.⁴¹ Pelajar Pancasila adalah salah satu dari tujuan yang perlu dicapai dalam pendidikan Indonesia. Pelajar Pancasila dapat dibina dalam mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran strategis sebagai sarana mewujudkan generasi penerus yang memiliki wawasan kebangsaan dan global dari amanah yang ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Pelajar Pancasila mempunyai enam karakter di mana keenam karakter perlu terinternalisasi dalam diri serta sikap peserta didik. Pelajar Pancasila mempunyai lima profil sebagai berikut :⁴²

- a. Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
- b. Berkebhinekaan

⁴¹ Montoha, "Hukum dan Kekuasaan Suatu Kajian Fiqh Siyasa", dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed), Hukum dan Kekuasaan, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), 122-123.

⁴² Nursa'ban, dkk Buku Panduan Guru IPS Untuk SMP Kelas VII, Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Sosial, (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan : Jakarta), 2021.

- c. Gotong Royong
- d. Mandiri
- e. Bernalar Kritis

Menerapkan nilai-nilai demokrasi pancasila yang baik di lingkungan sekolah pastinya tidaklah mudah, harus didukung oleh semua warga sekolah salah satunya adalah pentingnya peran seorang guru dalam mengajar di dalam ataupun di luar kelas. Dan salah satu mata pelajaran yang relevan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Melalui mata pelajaran IPS siswa diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, tanggung jawab, dan menjadi warga dunia yang cinta damai.⁴³ Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan dengan membiasakan diri setiap warga sekolah untuk dapat bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan, membentuk organisasi-organisasi sekolah, saling menghargai dan menghormati keberadaan individu maupun kelompok yang ada di sekolah.

Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai Pancasila yang dirumuskan oleh founding father atau pendiri bangsa ini. Nilai-nilai tersebut yaitu :

- a. Ketuhanan yang berkebudayaan/Ketuhanan yang maha Esa
- Ketuhanan adalah kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan 30aradi-politis

⁴³ Zamroni, Meningkatkan Mutu Sekolah, (Jakarta : PSPA Muhammadiyah, 2007), 65

yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.⁴⁴ Di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan.⁴⁵ Dengan adanya pernyataan tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan nilai Ketuhanan yang ada dalam Pancasila maka dapat menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan demokrasi bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila.

Dalam penelitian ini sila pertamanya yakni guru menerapkan dan mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS , yaitu mengetahui sejarah UUD 1945 tepat dalam sejarah nya terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang tercantum sila pancasila di alinea keempat. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea 4 yang merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaedah Negara yang Fundamental dan punya 2 kedudukan, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi.

- b. Kemanusiaan universal/Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, apabila digali merupakan visi Bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai

⁴⁴ Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), 110.

⁴⁵ Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011), 116.

manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi.⁴⁶ Dalam sila ini diharapkan Bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan, khususnya Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu prinsip Demokrasi Pancasila.

Dalam penelitian ini sila keduanya yakni pemerintah menciptakan sekolah rakyat (SR) yang di buka di seluruh Indonesia dan diberikan secara Cuma-Cuma oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat literasi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Rakyat (SR) juga diberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi semua kalangan. Jadi pendidikan bisa ditempuh dalam semua kalangan yang sesuai dengan sila pancasila kedua yaitu adil dan beradab.

- c. Persatuan dalam kebhinekaan/Persatuan Indonesia Dalam sila ini banyak mempertaruhkan Indonesia sebagai 32 aradigm yang harusnya dapat mewakili berbagai etnis baik minoritas maupun mayoritas. Berbagai upaya pun dilakukan oleh negara guna memberikan keadilan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Upaya negara untuk member ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu

⁴⁶ Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 244.

setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi consensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsurunsur pemersatu bangsa lainnya, seperti Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini sila ketiganya yakni guru menerapkan dan mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS yaitu tentang sumpah pemuda 1928. Peristiwa penting dalam sejarah tentang kesadaran akan kesatuan kita sebagai suatu bangsa yang besar dapat ditemukan dengan jelas dalam peristiwa sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 silam. Rentetan peristiwa telah dilewati oleh bangsa yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan ini. Ini kemudian dijawab dalam pembentukan dan penetapan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa kita. Ide persatuan ini telah membuat bangsa yang besar ini masih tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Menjadi tujuan utama dari sumpah pemuda, maka para founders menuangkan isi sumpah pemuda ke dalam sila pancasila yang ketiga. Sumpah pemuda mampu mencapai bentuknya yang sempurna ketika dikaitkan dengan sila ketiga pancasila dimana persatuan menjadi dasar utama yang mampu mengarahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

- d. Demokrasi permusyawaratan/Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling dekat dan berpengaruh

kepada demokrasi. Sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama yakni dengan bermusyawarah. Bermusyawarah tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat mayoritas. Berbeda dengan proses voting yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat mayoritas namun menutup kesempatan bagi masyarakat minoritas. Gagasan demokrasi menurut pandangan Soekarno menyatakan dengan semangat penuh kekeluargaan atau gotong royong. Gagasan Soekarno ini didasarkan oleh kenyataan bahwa bangsa ini merupakan satu keluarga di dalam Indonesia, bangsa yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama jadi selayaknyalah bangsa ini dapat saling membantu dan saling gotong royong. Menurut pandangan Hatta ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia yakni : stimulus demokrasi desa, stimulus Islam dalam demokrasi, stimulus barat atas demokrasi. Pandangan Hatta ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soekarno tentang hal gotong royong, keluarga dan perjuangan bersama. Maka dari itu masyarakat Indonesia diharapkan mampu menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan antara setiap warga negara.

Dalam penelitian ini sila keempatnya yakni berkaitan dengan demokrasi pancasila. Guru menerapkan dan mengajarkan kepada siswa mengenai sejarah pemilu 1966, sila keempat juga menjadi

paradigma dasar bagi pembangunan politik dan pemerintahan nasional. Di dalam sila keempat terkandung prinsip musyawarah mufakat, perwakilan, gotong royong, serta daulat rakyat (kerakyatan), yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi secara global. Pancasila, khususnya sila keempat, memiliki persamaan dan senyawa dengan demokrasi yang telah menjadi bentuk pemerintahan mayoritas negara-negara dunia saat ini. Pemilu sebagai instrumen demokrasi dan berperan dalam sirkulasi elit dan kepemimpinan, merupakan salah satu aspek yang dicakupi dan dituntun pelaksanaannya oleh sila keempat pancasila. Melalui pemilu, segenap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.

- e. Keadilan sosial/Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual.⁴⁷ Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua masyarakat dari lapisan manapun yang menjadi warga negara Indonesia. Sosial yang dimaksud bukanlah sosial yang sama artinya di negara komunis. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi atau individu dengan kehidupan kelompok/masyarakat.

⁴⁷ Syahrial, *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 42.

Dalam penelitian ini sila kelimanya yakni Dalam sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan melalui pemerintah Indonesia mendukung penuh resolusi PBB untuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, merupakan pijakan sikap politik yang jelas, lugas, tuntas dan bahkan ini merupakan sikap politik luar negeri Indonesia sejak berdirinya RI. Dengan mendukung resolusi PBB ini pemerintah Indonesia mencerminkan akan nilai Pancasila pada sila kelima, yaitu negara Palestina berhak mendapatkan keadilan terhadap negaranya sendiri. Sila kelima dalam Pancasila ini juga mencerminkan pada pelaksanaan bantuan BLT, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan BLT berfungsi untuk membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya. Ada yang bersyarat (*conditional cash transfer*), ada pula yang tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, dan juga dalam mewujudkan nilai sila kelima dalam Pancasila, yaitu rakyat Indonesia harus menerima keadilan baik yang mampu atau bagi rakyat yang tidak mampu.

Uraian demokrasi dan Pancasila tersebut dapat menjadi rumusan dalam menguraikan nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang kita kenal di Indonesia tidak hanya mencakup demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik merupakan arti primer dari demokrasi.⁴⁸ Sedangkan arti sekundernya ialah demokrasi ekonomi dan sosial. Dalam membahas demokrasi pancasila penelitian ini membahas tentang guru menanamkan demokrasi pancasila dalam sebuah pembelajaran yang diajarkan oleh guru sesuai dengan sila-sila pancasila.

2. Pembelajaran IPS

Salah satu mata pelajaran yang relevan dengan pendidikan nilai menurut Siregar adalah ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial mengkaji materi dan mengaitkannya pada kondisi dan perkembangan masyarakat secara empiris. Salah satu tujuan dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah menjadikan sebagai warga negara yang baik.⁴⁹ Mulyana menjelaskan bahwa melalui pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan nilai, etika dan moral diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikannya pada konsep dan prinsip dalam proses pembelajaran. Nilai, etika dan moral tersebut diintegrasikan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran. Peserta didik

⁴⁸ Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Ombak Dua. 2013), 30.

⁴⁹ Siregar, dkk, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 62.

akan mempunyai daya saing global dalam menghadapi perkembangan zaman ini.⁵⁰

Pembelajaran IPS dalam penyampaian dilakukan melalui upaya mengintegrasikan dalam nilai dan sikap. Pembelajaran IPS yang baik adalah pembelajaran yang berbasis nilai. Pembelajaran IPS dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah nilai demokrasi. Agar nilai tersebut dapat diterapkan secara efektif, maka nilai-nilai tersebut dapat diajarkan secara terpadu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.⁵¹

Pembelajaran IPS merupakan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dimana materi IPS disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik dan kebutuhan siswa agar pembelajaran IPS lebih bermakna bagi siswa. Pembelajaran IPS, diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman siswa pada permasalahan yang ada dalam kehidupan sekitarnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat.⁵² Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang mengkaji secara sistematis dan terkoordinasi berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama dan sosiologi serta materi yang sesuai dari humaniora, matematika dan ilmu pengetahuan alam. IPS

⁵⁰ Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 191.

⁵¹ Susanto, *Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 38.

⁵² Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 56.

sebagai studi yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora adalah untuk meningkatkan kemampuan warga negara.⁵³

Dalam pelaksanaannya pembelajaran IPS mempunyai prinsip yang digunakan. Prinsip dalam pembelajaran IPS mencakup pada proses pembelajaran yang bermakna mengedepankan ide-ide yang diterapkan dalam kehidupan, pembelajaran yang terintegrasi, pembelajaran yang berbasis pada nilai, pembelajaran yang mencapai tujuannya dan pembelajaran aktif.⁵⁴

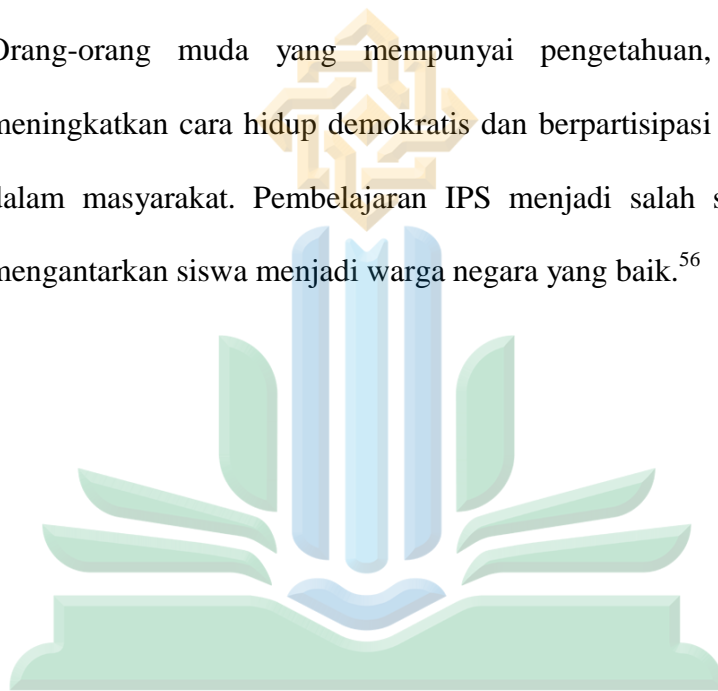
Tujuan pembelajaran IPS yaitu: 1) menekankan tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral paradigme negara dan agama; 2) menekankan pada berpikir ilmuwan; 3) menekankan paradigme inquiri; dan 4) mendidik siswa mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya. Melalui mata pelajaran IPS diharapkan peserta didik dapat belajar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendapat lain mengenai tujuan pembelajaran IPS dijelaskan bahwa pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, dan sosial. Pembelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis

⁵³ Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (6), 2017, 67–72, 17.

⁵⁴ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2014), 25.

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memenuhi kehidupan masyarakat yang dinamis.⁵⁵

Tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mendukung kompetensi warga negara dalam hal pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang demokratis yang dibutuhkan siswa untuk terlibat aktif dalam kehidupan. Orang-orang muda yang mempunyai pengetahuan, terampil serta meningkatkan cara hidup demokratis dan berpartisipasi sebagai anggota dalam masyarakat. Pembelajaran IPS menjadi salah satu cara dalam mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.⁵⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Zamroni, Pendidikan Demokrasi dan Demokrasi dalam Transisi, Prakondisi Menuju Era Global, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 287.

⁵⁶ Wahidmurni, Metodologi Pembelajaran IPS Pengembangan Proses Pembelajaran IPS Di Sekolah atau Madrasah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.⁵⁷

Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif.⁵⁸

Penelitian kualitatif dikemukakan dari sisi lainnya bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan

⁵⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 156.

⁵⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34.

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisi dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁵⁹

Penulis memilih pendekatan kualitatif ini karena dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso menggunakan pembelajaran IPS terhadap integrasi nilai-nilai demokrasi. Proses melakukan penelitian secara langsung terhadap responden atau di lapangan yang dikenal sebagai penelitian lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau objek tempat dilakukannya penelitian adalah lokasi penelitian. Tempat penelitian ini berada di MTs Lombok Kulon yang berada di Dusun Pasar Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Alasan memilih tempat lokasi ini yakni dikarenakan dalam pembelajaran IPS guru sangat pandai dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokratis pada siswa.

C. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek atau informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive*. *Purposive* merupakan salah satu teknik dalam pengambilan suatu subjek dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu (seseorang yang dianggap paling tahu mengenai informan yang kita dibutuhkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait kajian etnobotani tradisi manten tebu sebagai sumber belajar materi keanekaragaman hayati. Maka dari itu

⁵⁹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Dan Komunikasi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

diperlukan subjek yang bisa memberikan informan sesuai yang dibutuhkan.

Adapun subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala MTs Lombok Kulon : Bapak Imam
2. Guru IPS MTs Lombok Kulon : Bapak Yialianto
3. Siswa kelas VII MTs Lombok Kulon : Wulan, Mey, Rina

Peneliti memilih beberapa orang yang bersangkutan diatas dikarenakan dianggap yang paling mengerti kondisi lapangan dan paling mengerti mengenai topic pembahasan yang diusung oleh peneliti untuk menjadikan sebuah informasi yang sangat penting yang akan ditulis pada skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara langsung proses tradisi manten tebu yang dilaksanakan di Pabrik Gula Semboro serta melihat jenis tumbuhan apa saja yang digunakan dalam ritual adat tradisi manten tebu. Kemudian observasi dilakukan di MTs Lombok Kulon untuk mengetahui lebih dalam proses pengintegrasian nilai-nilai demokratis yang terdapat pada pembelajaran IPS. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif adalah peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 299.

Dalam observasi ini, peneliti mengamati secara langsung terkait dengan pembelajaran IPS di MTs Lombok Kulon.

Adapun data yang akan diperoleh peneliti melalui observasi, yaitu:

- a. Profil MTs Lombok Kulon.
- b. Pembelajaran IPS dalam pengintegrasian nilai-nilai demokratis.
- c. Implikasi dalam pengintegrasian nilai-nilai demokratis.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepala madrasah dan guru IPS mengenai penanaman nilai demokrasi yang ada di sekolah. Selanjutnya juga mewawancarai siswa MTs Lombok Kulon mengenai makna demokrasi dan pentingnya demokrasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informan terkait penelitian yang akan diteliti. Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara menanamkan nilai demokratis pada siswa?
- b. Apa pentingnya mendalami nilai demokratis?
- c. Bagaimana implikasi yang diperoleh dari pembelajaran IPS yang menanamkan nilai demokratis pada siswa?

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang sudah dikumpulkan dari proses wawancara dan juga observasi yang dilakukan. Pada penelitian ini data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dari proses wawancara dan dokumentasi, yaitu:

- a. Kegiatan pembelajaran IPS
- b. Kegiatan yang menunjukkan nilai demokratis

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai dengan pada tahap penulisan laporan.⁶¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari tiga langkah, yaitu: 1) kondedsasi data (*data condensation*); 2) penyajian data (*data display*); 3) menarik kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verivication*). Kondesnsasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).⁶²

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Merupakan tahap pertama dalam analisis data. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan aneka macam cara (observasi, wawancara, intidari dokuman, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siapdigunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis).⁶³

⁶¹ Hengki Wijaya dan Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 155.

⁶² Mtthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru*, terj. Tjetcep Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 2014), 15.

⁶³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 16.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*) Miles dan Huberman menyatakan bahwa:

“Kondensasi adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi, data aksi dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih mantap/kuat”

⁶⁴Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu:

a. Proses Pemilihan (*Selecting*)

Dalam proses ini peneliti memilih data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu dari MTs Lombok Kulon dan hasil dari wawancara.

b. Pengerucutan (*Focusing*) dan Penyederhanaan (*Simplifying*) Dalam tahap ini peneliti melakukan reduksi data hasil wawancara.

c. Peringkasan (*Abstracting*) dan Transformasi (*Transforming*)

Pada tahap ini peneliti melakukan pemaparan analisis data untuk mengetahui kekonsistenan berdasarkan fakta data dan hasil wawancara.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam hal ini, Miles, Huberman, dan Saldana menyatakan bahwa “*The most frequent form of display for qualitative data in the past has been extended text*”, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang diperluas (narasi).⁶⁵

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 142.

⁶⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru*, terj. Tjetcep Rohidi, 18.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan pada tahap awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan dirubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat terhadap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkam data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.⁶⁶

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam melakukan uji kredibilitas data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber data lain diluar data yang telah didapatkan untuk melakukan pengecekan data atau melakukan perbandingan data. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.⁶⁷

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji kebenaran data tertentu dari berbagai informan. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari kepala madrasah, guru IPS dan siswa kelas VII.

Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek informasi data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara,

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 217.

⁶⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2018), 369.

dokumentasi lapangan dengan tujuan untuk memastikan data mana yang dianggap benar dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Menyusun rancangan penelitian yang terdiri dari latar belakang mengenai integrasi nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran IPS, pemilihan lokasi, kemudian penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan uji keabsahan data.

b. Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi penelitian ini berkunjung ke lokasi penelitian di MTs Lombok Kulon. Hal ini dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenal keadaan lokasi penelitian.

c. Mengurus perizinan

Untuk melakukan penelitian harus mendapatkan izin dari yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan surat perizinan tugas dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang akan diserahkan kepada kepala MTs Lombok Kulon.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Pada tahap ini peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penelitian seperti memilih informan yang dijadikan sebagai

narasumber dan menyusun beberapa pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara serta menyiapkan kamera untuk mengambil gambar buat dokumentasi.

H. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengenai pengintegrasian nilai demokrasi dilakukan pada saat melakukan penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Pengolahan Data

Selanjutnya data yang sudah terkumpul akan diolah menjadi uraian singkat dan akan ditarik kesimpulan dalam proses analisis data.

3. Tahap Penyelesaian

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang kemudian dikonsultasikan pada dosen pembimbing.
- b. Setelah konsultasi, melakukan revisi perbaikan-perbaikan dalam laporan penelitian sebelum diuji dan dijilid.
- c. Penggandaan laporan penelitian tentang pengintegrasian nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS kelas VII di MTs Lombok Kulon yang nantinya akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil MTs Lombok Kulon

MTs Lombok Kulon adalah sebuah institusi pendidikan MTs swasta yang berlokasi di Dusun Pasar Lombok Kulon, Kab. Bondowoso. MTs swasta ini memulai kegiatan pendidikan belajar mengajarnya pada tahun 1993. Saat sekarang MTSS Lombok Kulon memakai panduan kurikulum belajar pemerintah yaitu MTSS Lombok Kulon dikelola oleh operator sekolah Sutikno.

- a. NSM : 121235110076
- b. NPSN : 20581795
- c. Nama Madrasah : MTs Lombok Kulon
- d. Status Madrasah : Swasta
- e. Waktu Belajar : Pagi
- f. NPWP : 31.249.066.7-656.000
- g. Jalan/Kampung & RT/RW : Jln. Trunujoyo No.25 Dusun Pasar
RT.001 RW.001
- h. Desa/Kelurahan : Lombok Kulon
- i. Kecamatan : Wonosari
- j. Kabupaten/Kota : Bondowoso
- k. Provinsi : Jawa Timur
- l. Kode Pos : 68282

- m. No.SK Pendirian : Wn.06.03/PP 03.23260/1995
- n. Tanggal SK Pendirian : 03/03/1993
- o. No. SK Ijin Operasional : MTsS/11.0076/2017
- p. Tanggal SK Operasional : 02 Mei 2017
- q. Status Akreditasi : B
- r. No. SK Akreditasi : 300/BAP-SM/SK/XI/2014

2. Visi dan Misi MTs Lombok Kulon

a. Visi

Unggul dalam Prestasi, Bermutu tinggi, Berpendirian Sejati
Berdasarkan Iman dan Taqwa.

b. Misi

- 1) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif dalam prestasi akademik maupun non akademik.
- 2) Melaksanakan KBM dengan efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Menerapkan prinsip dan nilai – nilai Islam didalam dan di luar Madrasah.
- 4) Mengoptimalkan kompetensi Warga Madrasah dalam memberikan pelayanan kepada siswa dan masyarakat.

3. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Jumlah Guru Keseluruhan : 19 Orang
- b. Guru Tetap Yayasan : 19 Orang
- c. Guru Tidak Tetap : - Orang

- d. Guru Bantu Pusat : - Orang
- e. Guru PNS dipekerjakan : - Orang
- f. Jumlah Karyawan Keseluruhan : 4 Orang
- g. Kepala TU : 1 Orang
- h. Staf Tata Usaha : 1 Orang
- i. Penjaga : 1 Orang e. Kebun : 1 Orang

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mendeskripsikan cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso

Integrasi banyak diterapkan dalam segala bidang, seperti sosial, politik, budaya sampai ekonomi yang pada intinya bidang tersebut bisa diperbaharui dan menjadi kesatuan. Dalam bidang keilmuan, integrasi diartikan sebagai bentuk yang menyatukan elemen-elemen dengan karakter berbeda dan klasifikasinya sesuai konsep, unit dan paradigma. Dalam hal ini integrasi akan dihubungkan dengan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Bondowoso. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku guru IPS :

“Integrasi ini bagi saya adalah sebuah penyatuan elemen-elemen ke dalam suatu konsep pembelajaran. Dalam pembelajaran IPS ini banyak sub 52aradi termasuk materi UUD 1945, pemilu, resolusi PBB saya ringkas dalam satu konsep pembelajaran yakni dalam pancasila saya masukkan ke dalam setiap sila pancasila. Jadi saya mengajar ini tidak terpaku pada buku saja. Saya kembangkan sendiri. Guru ini harus pintar berinovasi dan kreatif. Sekarang gini guru tidak harus terpaku pada silabus dan RPP kalau bisa

kembangkan sendiri sekiranya siswa menjadi lebih pintar dan berfikir luas. RPP saya pun beda dengan yang ada di internet atau apapun saya bikin sendiri.”⁶⁸

Dari pernyataan oleh Bapak Yulianto selaku guru IPS diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah yakni Bapak Imam :

“Ya, saya memang membebaskan para guru dalam mengajar agar tak hanya terpaku pada buku. Toh yang dibutuhkan siswa kalau lulus sekolah bukan pembelajaran bejibun itu. Kalau bisa ringkas. Berinovasilah! Jangan membebankan siswa untuk membeli buku.”⁶⁹

Dari pernyataan oleh Bapak Yulianto selaku guru IPS bisa disimpulkan bahwa dalam pembelajaran IPS terdapat banyak sub bab kemudian diringkas dan disatukan oleh guru IPS yakni dengan mempelajari nilai-nilai demokrasi pancasila.

Berdasarkan hasil observasi memang guru tidak mewajibkan siswa untuk memiliki buku paket atau apapun karena disetiap harinya guru IPS selalu berinovasi dalam pembelajaran.

Berikut yakni hasil penelitian untuk pengintegrasian dari setiap sila dalam pancasila :

a. Sila Pertama (Ketuhanan yang Maha Esa)

Dalam sila ini guru mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS, yaitu mengetahui sejarah UUD 1945. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku guru IPS :

⁶⁸ Wawancara, Bapak Yulianto selaku guru IPS, 20 April 2024.

⁶⁹ Wawancara, Bapak Imam selaku Kepala Madrasah, 22 April 2024.

“Dalam sila pertama ini saya mengajarkan kepada siswa untuk mengetahui sejarah UUD. Kalau dalam artian yang sebenarnya sila pertama ini mengenai tentang ketuhanan, kita harus mengenal Allah lebih dalam untuk meyakini bahwa memang Tuhan memang tunggal/satu tidak ada lagi tuhan selain Allah. Nah dengan itu dalam meyakini adanya Tuhan itu satu ya pasti kita akan menggali mengenai sejarahnya. Kita perlu tahu sejarahnya, jadi disini dalam sila pertama saya ajarkan kepada siswa sejarah UUD untuk dapat meyakini bahwa UUD sumber hukum tertinggi di Indonesia.”⁷⁰

Dari hasil wawancara dengan guru IPS diperkuat juga dengan hasil wawancara oleh siswa sebagai berikut :

“Iya pak, diajarkan di bab satu dulu itu sejarah undang-undang dasar dikaitkan juga dengan sila pertama dalam pancasila. Pokoknya setiap ngajar itu gurunya selalu mengaitkan dalam pancasila. Termasuk dalam sila ke berapa? Mengapa masuk sila itu?”⁷¹

“Hehe... saya lupa pak pokok iya benar memang selalu dikaitkan dengan pancasila. Saya ingat sih sebenarnya tapi saya gak bisa menjelaskannya.”⁷²

“Iya guru IPS pernah bilang mau menjadikan kita itu generasi pancasila gitu. Harus paham demokrasi-demokrasi dalam pancasila tak lupa juga menyisipkan pembelajaran IPS. Dalam sila pertama contohnya untuk mengenali Allah itu Esa ya bagaimana caranya ya dengan mengetahui sejarahnya atau seluk beluk mengenai Allah. Hehe sepemahaman saya gitu sih”⁷³

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa guru selalu mengaitkan pembelajaran IPS dengan pancasila. Yangmana dalam sila pertama ini guru mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS, yaitu mengetahui sejarah UUD 1945.

Dari hasil observasi ditemukan yakni peneliti mereview pembelajaran mengenai sejarah UUD 1945 benar adanya siswa dengan

⁷⁰ Wawancara, Bapak Yulianto selaku guru IPS, 20 April 2024.

⁷¹ Wawancara, Rina selaku siswa, 23 April 2024.

⁷² Wawancara, Mey selaku siswa, 23 April 2024.

⁷³ Wawancara, Wulan selaku siswa, 23 April 2024.

aktif bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti mengenai sejarah UUD 1945.⁷⁴

Dari hasil wawancara dan observasi diatas diperkuat juga dengan hasil dokumentasi saat peneliti berada di lapangan sebagai berikut :



Gambar 4.1⁷⁵

Peneliti Mereview Pembelajaran Sejarah UUD 1945

Dari gambar diatas bisa disimpulkan bahwa siswa sangat memahami materi sejarah UUD 1945 ditandai dengan siswa yang bisa menjawab semua pertanyaan dari peneliti mengenai sejarah UUD 1945.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa dalam sila pertama guru mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS, yaitu mengetahui sejarah UUD 1945.

⁷⁴ Observasi, MTs Lombok Kulon, 23 April 2024.

⁷⁵ Dokumentasi, MTs Lombok Kulon, 23 April 2024.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Dalam sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab pemerintah menciptakan sekolah rakyat (SR) yang di buka di seluruh Indonesia dan diberikan secara Cuma-Cuma oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat literasi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Rakyat (SR) juga diberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi semua kalangan. Jadi pendidikan bisa ditempuh dalam semua kalangan yang sesuai dengan sila pancasila kedua yaitu adil dan beradab. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku guru IPS :

“Untuk sila kedua ini saya mengabungkan dengan Sekolah Rakyat (SR). Ini gak ada dalam pembelajaran IPS namun saya ajarkan seperti yang saya bilang tadi saya mengajar tanpa buku. Saya inovasikan sendiri. Yang penting anak-anak ilmunya banyak mengenai Pancasila. Karna pancasila ini bagi saya penting mengingat saya adalah guru IPS ya. Jadi sejarah mengenai penjajahan-penjajahan gak perlu saya ajarkan di mereka menurut saya pkurang penting itu mas.”⁷⁶

Dari hasil wawancara dengan guru IPS diatas diperkuat juga dengan hasil wawancara siswa :

“Oooh Sekolah Rakyat ya pak. Iya pernah diajarkan karena sila kedua kan memang ada bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hehe.. saya hafal pancasila karena syarat untuk mendapat nilai bagus dari guru IPS saya ya suruh menghafalkan Pancasila. Oh iya nyambung lagi ke sila ke dua itu kemanusiaan kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap 56aradi terutama anak-anak yang bukan dari kalangan bangsawan waktu itu ya tidak sekolah bahkan buta huruf itu yang membikin Indonesia zaman dahulu tidak maju maka

⁷⁶ Wawancara, Bapak Yulianto selaku guru IPS, 20 April 2024.

dibangunlah Sekolah Rakyat tersebut. Jadi untuk anak-anak yang bukan berasal dari kaum bangsawan mendapat keadilan untuk bersekolah gratis pada masa itu”⁷⁷

“Sekolah rakyat kalau gak salah itu pernah diajarkan oleh guru IPS saya. Sekolah rakyat ini dicetuskan oleh Jepang namanya itu Kokumin Gakko.”⁷⁸

“Sekolah rakyat itu diperuntukkan bagi anak yang bukan dari kalangan bangsawan.”⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dalam sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab pemerintah menciptakan sekolah rakyat (SR) yang di buka di seluruh Indonesia dan diberikan secara Cuma-Cuma oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat literasi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Rakyat (SR) juga diberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi semua kalangan. Jadi pendidikan bisa ditempuh dalam semua kalangan yang sesuai dengan sila pancasila kedua yaitu adil dan beradab.

Dari hasil observasi yakni siswa sangat terampil dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai sekolah rakyat maka bisa disimpulkan mereka benar-benar paham apa yang telah diajarkan oleh gurunya.⁸⁰

Berikut yakni hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti saat penelitian di lapangan :

⁷⁷ Wawancara, Rina selaku siswa, 23 April 2024.

⁷⁸ Wawancara, Mey selaku siswa, 23 April 2024.

⁷⁹ Wawancara, Wulan selaku siswa, 23 April 2024.

⁸⁰ Observasi, MTs Lombok Kulon, 23 April 2024.



Gambar 4.2⁸¹
Wawancara dengan Siswa

Dari gambar diatas peneliti memilih siswa acak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait sekolah rakyat. Nampak siswa yang diwawancarai dengan tegas dan terampilnya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas disimpulkan bahwa dalam sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab pemerintah menciptakan sekolah rakyat (SR) yang di buka di seluruh Indonesia dan diberikan secara Cuma-Cuma oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat literasi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Rakyat (SR) juga diberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi semua kalangan. Jadi pendidikan bisa ditempuh dalam semua kalangan yang sesuai dengan sila pancasila kedua yaitu adil dan beradab.

⁸¹ Dokumentasi, MTs Lombok Kulon, 23 April 2024.

c. Persatuan Indonesia

Dalam sila ketiga, yang berbunyi persatuan Indonesia Guru menerapkan dan mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS yaitu tentang sumpah pemuda 1928. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku guru IPS :

“Mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS yaitu tentang sumpah pemuda 1928. Peristiwa penting dalam sejarah tentang kesadaran akan kesatuan kita sebagai suatu bangsa yang besar dapat ditemukan dengan jelas dalam peristiwa sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 silam. Rentetan peristiwa telah dilewati oleh bangsa yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan ini. Ini kemudian dijawab dalam pembentukan dan penetapan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa kita. Ide persatuan ini telah membuat bangsa yang besar ini masih tetap berdiri kokoh hingga saat ini menjadi tujuan utama dari sumpah pemuda, maka menuangkan isi sumpah pemuda ke dalam sila pancasila yang ketiga. Sumpah pemuda mampu mencapai bentuknya yang sempurna ketika dikaitkan dengan sila ketiga pancasila dimana persatuan menjadi dasar utama yang mampu mengarahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.”⁸²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yulianto diatas diperkuat

dengan hasil wawancara dengan siswa sebagai berikut :

“Sila ketiga ya sumpah pemuda pak. Karena para pemuda bersatu untuk merdeka.”⁸³

“Sila ketiga, sumpah pemuda. Dengan kejadian sumpah pemuda itu kita jadi tau pemuda-pemuda tersebut bersatu demi tujuan yang sama.”⁸⁴

“Sumpah pemuda tentang persatuan.”⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa guru mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS yaitu tentang

⁸² Wawancara, Bapak Yulianto selaku guru IPS, 20 April 2024.

⁸³ Wawancara, Rina selaku siswa, 23 April 2024.

⁸⁴ Wawancara, Mey selaku siswa, 23 April 2024.

⁸⁵ Wawancara, Wulan selaku siswa, 23 April 2024.

sumpah pemuda 1928. Peristiwa penting dalam sejarah tentang kesadaran akan kesatuan kita sebagai suatu bangsa yang besar dapat ditemukan dengan jelas dalam peristiwa sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 silam. Rentetan peristiwa telah dilewati oleh bangsa yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan ini. Ini kemudian dijawab dalam pembentukan dan penetapan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa kita. Ide persatuan ini telah membuat bangsa yang besar ini masih tetap berdiri kokoh hingga saat ini menjadi tujuan utama dari sumpah pemuda, maka menuangkan isi sumpah pemuda ke dalam sila pancasila yang ketiga. Sumpah pemuda mampu mencapai bentuknya yang sempurna ketika dikaitkan dengan sila ketiga pancasila dimana persatuan menjadi dasar utama yang mampu mengarahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa siswa-dan siswa yang ada disana hafal tentang isi sumpah pemuda.⁸⁶

Dari hasil wawancara dan dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa dalam sila ketiga guru mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS yaitu tentang sumpah pemuda 1928. Peristiwa penting dalam sejarah tentang kesadaran akan kesatuan kita sebagai suatu bangsa yang besar dapat ditemukan dengan jelas dalam peristiwa sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 silam. Rentetan peristiwa telah dilewati oleh bangsa yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan

⁸⁶ Observasi, MTs Lombok Kulon, 23 April 2024.

golongan ini. Ini kemudian dijawab dalam pembentukan dan penetapan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa kita. Ide persatuan ini telah membuat bangsa yang besar ini masih tetap berdiri kokoh hingga saat ini menjadi tujuan utama dari sumpah pemuda, maka menuangkan isi sumpah pemuda ke dalam sila Pancasila yang ketiga. Sumpah pemuda mampu mencapai bentuknya yang sempurna ketika dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila dimana persatuan menjadi dasar utama yang mampu mengarahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Dalam sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Berikut yakni hasil wawancara

dengan Bapak Yulinato selaku guru IPS :

“Menerapkan dan mengajarkan kepada siswa mengenai sejarah pemilu 1966, sila keempat juga menjadi paradigma dasar bagi pembangunan politik dan pemerintahan nasional. Di dalam sila keempat terkandung prinsip musyawarah mufakat, perwakilan, gotong royong, serta daulat rakyat (kerakyatan), yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi secara global. Pancasila, khususnya sila keempat, memiliki persamaan dan senyawa dengan demokrasi yang telah menjadi bentuk pemerintahan mayoritas negara-negara dunia saat ini. Pemilu sebagai instrumen demokrasi dan berperan dalam sirkulasi elit dan kepemimpinan, merupakan salah satu aspek yang dicakupi dan dituntun pelaksanaannya oleh sila keempat Pancasila. Melalui pemilu, segenap warga negara yang telah memenuhi

persyaratan dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.”⁸⁷

Pendapat oleh guru IPS diperkuat oleh siswa sebagai berikut :

“Seingat saya yang berhubungan dengan sila keempat ini pemilu ya pak. Karena dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”⁸⁸

“Pemilu sih, gotong royong, musyawarah gitu pak seingat saya.”⁸⁹

“Sila keempat diajarkan mengenai gotong royong, kerjasama.”⁹⁰

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa guru mengajarkan banyak pada sila keempat ini yakni mengajarkan kepada siswa mengenai sejarah pemilu 1966, sila keempat juga menjadi paradigma dasar bagi pembangunan politik dan pemerintahan nasional. Di dalam sila keempat terkandung prinsip musyawarah mufakat, perwakilan, gotong royong, serta daulat rakyat (kerakyatan), yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi secara global. Pancasila, khususnya sila keempat, memiliki persamaan dan senyawa dengan demokrasi yang telah menjadi bentuk pemerintahan mayoritas negara-negara dunia saat ini. Pemilu sebagai instrumen demokrasi dan berperan dalam sirkulasi elit dan kepemimpinan, merupakan salah satu aspek yang dicakupi dan dituntun pelaksanaannya oleh sila keempat pancasila. Melalui pemilu, segenap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.

⁸⁷ Wawancara, Bapak Yulianto selaku guru IPS, 20 April 2024.

⁸⁸ Wawancara, Rina selaku siswa, 23 April 2024.

⁸⁹ Wawancara, Mey selaku siswa, 23 April 2024.

⁹⁰ Wawancara, Wulan selaku siswa, 23 April 2024.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mendapati dokumentasi terkait sila keempat ini yakni saat anak-anak memilih ketua kelas dan bergotong royong membersihkan kelas agar kelas menjadi nyaman dan bersih.⁹¹

Berikut yakni hasil dokumentasi yang telah ditemukan oleh peneliti :



Gambar 4.3⁹²
Siswa Piket Kelas

Dari dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa mereka menarpkan sila keempat yang telah mereka pelajari.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa guru mengajarkan mengenai sejarah pemilu 1966, paradigma dasar bagi pembangunan politik dan pemerintahan nasional, prinsip musyawarah mufakat, perwakilan, gotong royong, serta daulat rakyat (kerakyatan), yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi secara global.

⁹¹ Observasi, MTs Lombok Kulon, 23 April 2024.

⁹² Dokumentasi, MTs Lombok Kulon, 25 April 2024.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku guru IPS :

“Sila lima ini mempelajari melalui pemerintah Indonesia mendukung penuh resolusi PBB untuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, merupakan pijakan sikap politik yang jelas, lugas, tuntas dan bahkan ini merupakan sikap politik luar negeri Indonesia sejak berdirinya RI. Dengan mendukung resolusi PBB ini pemerintah Indonesia mencerminkan akan nilai Pancasila pada sila kelima, yaitu negara Palestina berhak mendapatkan keadilan terhadap negara nya sendiri. Sila kelima dalam Pancasila ini juga mencerminkan pada pelaksanaan bantuan BLT, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan BLT berfungsi untuk membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya. Ada yang bersyarat (*conditional cash transfer*), ada pula yang tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, dan juga dalam mewujudkan nilai sila kelima dalam Pancasila, yaitu rakyat Indonesia harus menerima keadilan baik yang mampu atau bagi rakyat yang tidak mampu.”⁹³

Pendapat dari guru IPS diperkuat juga dengan pendapat siswa sebagai berikut :

“sekarang kami pelajari dan itu bab terakhir. Itu tentang Resolusi PBB dan sumbangan BLT.”⁹⁴

“Free Palestine untuk sila terakhir.”⁹⁵

“Untuk sila terakhir kita mempelajari mengenai resolusi PBB yangmana dalam hal itu Indonesia juga ikut membela keadilan

⁹³ Wawancara, Bapak Yulianto selaku guru IPS, 20 April 2024.

⁹⁴ Wawancara, Rina selaku siswa, 20 April 2024.

⁹⁵ Wawancara, Mey selaku siswa, 20 April 2024.

bagi masyarakat Palestine. Dengan tidak memakan semua makanan dan minuman yang dijual para pendukung Israel.”⁹⁶

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa sila kelima yakni mereka mempelajari mengenai resolusi PBB dalam kasus Palestina dan mempelajari mengenai BLT.

Dari hasil observasi disimpulkan bahwa memang mereka saat ini mempelajari sila kelima untuk materi terakhir kenaikan kelas.⁹⁷

Dari hasil wawancara dan observasi diatas bisa disimpulkan bahwa guru mengajarkan tentang resolusi PBB terhadap rakyat Palestina dan peluncuran BLT

2. Mendeskripsikan implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso.

Implikasi adalah sebuah dampak dari suatu tindakan. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku guru IPS :

“Sebenarnya ya mas tujuan dari belajar IPS adalah untuk mendukung kompetensi warga negara dalam hal pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang demokratis yang dibutuhkan siswa untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang muda yang mempunyai pengetahuan, terampil serta meningkatkan cara hidup demokratis dan berpartisipasi sebagai anggota dalam masyarakat. Ditambah lagi saya berinovasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila dalam pembelajaran IPS ya akibatnya menjadi salah satu cara dalam mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.”⁹⁸

⁹⁶ Wawancara, Wulan selaku siswa, 20 April 2024.

⁹⁷ Observasi, MTs Lombok Kulon, 23 April 2024.

⁹⁸ Wawancara, Bapak Yulianto selaku guru IPS, 20 April 2024.

Pendapat dari Bapak Yulianto selaku guru IPS diperkuat oleh pendapat Bapak Imam selaku Kepala Madrasah :

“Dalam hal ini pembelajaran IPS menurut penilaian saya berdampak pada kecintaan kepada negara yang berujung siswa-siswi disini akan menjadi remaja yang baik dan berkarakter.”⁹⁹

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso yakni menjadikan siswa siswi memahami mengenai segala hal tentang sejarah di Indonesia yang ada kaitannya dengan nilai demokrasi pancasila yang berimbas mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.

Dari hasil observasi dinyatakan bahwa memang pengetahuan siswa-siswa yang ada di MTs Lombok kulon mengetahui nilai-nilai demokrasi pancasila sangat bagus ditandai dengan mereka bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait nilai demokrasi setiap sila.¹⁰⁰

Dari hasil wawancara dan dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa Setelah mempelajari IPS lebih memahami mengenai sejarah yang berkaitan dengan bangsa Indonesia yang menjadikan dan mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.

⁹⁹ Wawancara, Bapak Imam selaku Kepala Madrasah, 22 April 2024.

¹⁰⁰ Observasi, MTs Lombok Kulon, 23 April 2024.

C. Pembahasan Temuan

Tabel 4.1
Hasil Temuan

No.	Fokus	Hasil
1.	Mendeskripsikan cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sila pertama guru mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS, yaitu mengetahui sejarah UUD 1945. 2. Sila kedua yaitu adil dan beradab mengajarkan mengenai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) 3. Sila ketiga mengajarkan tentang sumpah pemuda. 4. Sila keempat mengajarkan mengenai sejarah pemilu 1966, paradigma dasar bagi pembangunan politik dan pemerintahan nasional, prinsip musyawarah mufakat, perwakilan, gotong royong, serta daulat rakyat (kerakyatan), yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi secara global. 5. Sila Kelima mengajarkan tentang resolusi PBB terhadap rakyat Palestina dan peluncuran BLT
2.	Mendeskripsikan implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso.	Setelah mempelajari IPS lebih memahami mengenai sejarah yang berkaitan dengan bangsa Indonesia yang menjadikan dan mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.

1. Mendeskripsikan cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso

Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS dapat diartikan sebagai usaha untuk menggabungkan nilai-nilai demokrasi ke dalam proses pembelajaran IPS untuk mengenalkan nilai-nilai demokrasi dan diharapkan dapat memperoleh kesadaran mengenai nilai-nilai demokrasi serta menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam tingkah laku. Pendidikan nilai-nilai demokrasi pancasila menurut Hill adalah mengantar siswa mengenali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai, moral dan keyakinan agama untuk memasuki kehidupan budaya zamannya. Proses pendidikan nilai dilaksanakan dengan mengetahui nilai-nilai, menginternalisasi dan melaksanakan pada perbuatan. Pendidikan nilai terintegrasi kedalam mata pelajaran.¹⁰¹

Salah satu mata pelajaran yang relevan dengan pendidikan nilai menurut Siregar adalah ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial mengkaji materi dan mengaitkannya pada kondisi dan perkembangan masyarakat secara empiris. Salah satu tujuan dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah menjadikan sebagai warga negara yang baik.¹⁰²

Mulyana menjelaskan bahwa melalui pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan nilai, etika dan moral diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikannya pada konsep dan prinsip dalam proses pembelajaran.

¹⁰¹ Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Konstruktivistikme Dan VCT sebagai inovasi Pendekatan Pembelajaran Aktif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 70.

¹⁰² Siregar, dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. 62.

Nilai, etika dan moral tersebut diintegrasikan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran. Peserta didik akan mempunyai daya saing global dalam menghadapi perkembangan zaman ini.¹⁰³

Pembelajaran IPS dalam penyampaian 69arad dilakukan melalui upaya mengintegrasikan dalam nilai dan sikap. Pembelajaran IPS yang baik adalah pembelajaran yang berbasis nilai. Pembelajaran IPS dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah nilai demokrasi. Agar nilai tersebut dapat diterapkan secara efektif, maka nilai-nilai tersebut dapat diajarkan secara terpadu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.¹⁰⁴

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.¹⁰⁵

Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai Pancasila yang dirumuskan oleh founding father atau pendiri bangsa ini. Nilai-nilai tersebut yaitu : J E M B E R

a. Ketuhanan yang berkebudayaan/Ketuhanan yang maha Esa

Hasil temuan pada penelitian ini yakni pada sila pertamanya yakni guru menerapkan dan mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS , yaitu mengetahui sejarah UUD 1945 tepat dalam sejarah nya

¹⁰³ Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), 191.

¹⁰⁴ Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 2014), 38.

¹⁰⁵ Cholisin & Nasiwan, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 101.

terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang tercantum sila pancasila di alinea keempat. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea 4 yang merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaedah Negara yang Fundamental dan punya 2 kedudukan, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi.

Hasil temuan tersebut sejalan dengan teori bahwa ketuhanan adalah kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politis yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.¹⁰⁶ Di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan.¹⁰⁷ Dengan adanya pernyataan tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan nilai Ketuhanan yang ada dalam Pancasila maka dapat menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan demokrasi bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila.

b. Kemanusiaan universal/Kemanusiaan yang adil dan beradab

Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti pada sila keduanya yakni pemerintah menciptakan sekolah rakyat (SR) yang di

¹⁰⁶ Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan. Aktualitas Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 110.

¹⁰⁷ Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan. Aktualitas Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 116.

buka di seluruh Indonesia dan diberikan secara Cuma-Cuma oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat literasi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Rakyat (SR) juga diberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi semua kalangan. Jadi pendidikan bisa ditempuh dalam semua kalangan yang sesuai dengan sila pancasila kedua yaitu adil dan beradab.

Hasil temuan diatas sejalan dengan teori sila kemanusiaan yang adil dan beradab, apabila digali merupakan visi Bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi.¹⁰⁸ Dalam sila ini diharapkan Bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan, khususnya Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu prinsip Demokrasi Pancasila.

c. Persatuan dalam kebhinekaan/Persatuan Indonesia

Berdasarkan hasil temuan ditemukan bahwa dalam penelitian ini sila ketiganya yakni guru menerapkan dan mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS yaitu tentang sumpah pemuda 1928. Peristiwa penting dalam sejarah tentang kesadaran akan kesatuan kita sebagai suatu bangsa yang besar dapat ditemukan dengan jelas dalam peristiwa sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 silam. Rentetan peristiwa telah dilewati oleh bangsa yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan

¹⁰⁸ Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan. Aktualitas Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 244.

golongan ini. Ini kemudian dijawab dalam pembentukan dan penetapan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa kita. Ide persatuan ini telah membuat bangsa yang besar ini masih tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Menjadi tujuan utama dari sumpah pemuda, maka para founders menuangkan isi sumpah pemuda ke dalam sila pancasila yang ketiga. Sumpah pemuda mampu mencapai bentuknya yang sempurna ketika dikaitkan dengan sila ketiga pancasila dimana persatuan menjadi dasar utama yang mampu mengarahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Hasil temuan diatas sejalan dengan teori yakni sila ini banyak mempengaruhi Indonesia sebagai republik yang harusnya dapat mewakili berbagai etnis baik minoritas maupun mayoritas. Berbagai upaya pun dilakukan oleh negara guna memberikan keadilan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Upaya negara untuk member ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi consensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsurunsur pemersatu bangsa lainnya, seperti Bahasa Indonesia.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan. Aktualitas Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 244.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Berdasarkan hasil temuan pada sila keempatnya yakni berkaitan dengan demokrasi pancasila. Guru menerapkan dan mengajarkan kepada siswa mengenai sejarah pemilu 1966, sila keempat juga menjadi paradigma dasar bagi pembangunan politik dan pemerintahan nasional. Di dalam sila keempat terkandung prinsip musyawarah mufakat, perwakilan, gotong royong, serta daulat rakyat (kerakyatan), yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi secara global. Pancasila, khususnya sila keempat, memiliki persamaan dan senyawa dengan demokrasi yang telah menjadi bentuk pemerintahan mayoritas negara-negara dunia saat ini. Pemilu sebagai instrumen demokrasi dan berperan dalam sirkulasi elit dan kepemimpinan, merupakan salah satu aspek yang dicakupi dan dituntun pelaksanaannya oleh sila keempat pancasila. Melalui pemilu, segenap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Hasil temuan diatas sejalan dengan teori bahwa sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling dekat dan berpengaruh kepada demokrasi. Sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama yakni dengan bermusyawarah. Bermusyawarah tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat

mayoritas. Berbeda dengan proses voting yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat mayoritas namun menutup kesempatan bagi masyarakat minoritas. Gagasan demokrasi menurut pandangan Soekarno menyatakan dengan semangat penuh kekeluargaan atau gotong royong. Gagasan Soekarno ini didasarkan oleh kenyataan bahwa bangsa ini merupakan satu keluarga di dalam Indonesia, bangsa yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama jadi selayaknyalah bangsa ini dapat saling membantu dan saling gotong royong. Menurut pandangan Hatta ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia yakni : stimulus demokrasi desa, stimulus Islam dalam demokrasi, stimulus barat atas demokrasi. Pandangan Hatta ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soekarno tentang hal gotong royong, keluarga dan perjuangan bersama. Maka dari itu masyarakat Indonesia diharapkan mampu menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan antara setiap warga negara.¹¹⁰

e. Keadilan sosial/Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Berdasarkan hasil temuan yakni sila kelimanya yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan melalui pemerintah Indonesia mendukung penuh resolusi PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, merupakan pijakan sikap politik yang jelas, lugas, tuntas dan bahkan ini merupakan sikap

¹¹⁰ Yudi, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan. Aktualitas Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 244.

politik luar negeri Indonesia sejak berdirinya RI. Dengan mendukung resolusi PBB ini pemerintah Indonesia mencerminkan akan nilai Pancasila pada sila kelima, yaitu negara Palestina berhak mendapatkan keadilan terhadap negaranya sendiri. Sila kelima dalam Pancasila ini juga mencerminkan pada pelaksanaan bantuan BLT, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan BLT berfungsi untuk membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya. Ada yang bersyarat (*conditional cash transfer*), ada pula yang tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, dan juga dalam mewujudkan nilai sila kelima dalam Pancasila, yaitu rakyat Indonesia harus menerima keadilan baik yang mampu atau bagi rakyat yang tidak mampu.

Hasil temuan di atas sejalan dengan teori bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual.¹¹¹ Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua masyarakat dari lapisan manapun yang

¹¹¹ Syahrial, Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 42.

menjadi warga negara Indonesia. Sosial yang dimaksud bukanlah sosial yang sama artinya di negara komunis. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi atau individu dengan kehidupan kelompok/masyarakat.

2. Mendeskripsikan implikasi dari integritas nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso.

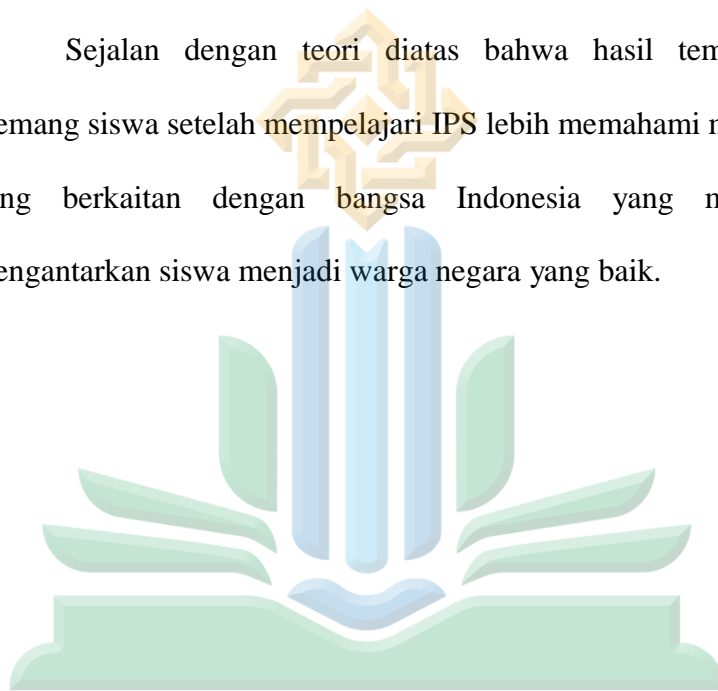
Tujuan pembelajaran IPS yaitu: 1) menekankan tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral 76aradigm negara dan agama; 2) menekankan pada berpikir ilmuwan; 3) menekankan 76aradigm76e inquiri; dan 4) mendidik siswa mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya. Melalui mata pelajaran IPS diharapkan peserta didik dapat belajar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendapat lain mengenai tujuan pembelajaran IPS dijelaskan bahwa pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, dan sosial. Pembelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memenuhi kehidupan masyarakat yang dinamis.¹¹²

Tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mendukung kompetensi warga negara dalam hal pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang

¹¹² Zamroni, Pendidikan Demokrasi dan Demokrasi dalam Transisi, Prakondisi Menuju Era Global, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 287.

demokratis yang dibutuhkan siswa untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang muda yang mempunyai pengetahuan, terampil serta meningkatkan cara hidup demokratis dan berpartisipasi sebagai anggota dalam masyarakat. Pembelajaran IPS menjadi salah satu cara dalam mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.¹¹³

Sejalan dengan teori diatas bahwa hasil temuan ditemukan memang siswa setelah mempelajari IPS lebih memahami mengenai sejarah yang berkaitan dengan bangsa Indonesia yang menjadikan dan mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹³ Wahidmurni, Metodologi Pembelajaran IPS Pengembangan Proses Pembelajaran IPS Di Sekolah atau Madrasah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso yakni pada sila pertama guru mengajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPS, yaitu mengetahui sejarah UUD 1945, pada sila kedua yaitu adil dan beradab mengajarkan mengenai pembangunan Sekolah Rakyat (SR), pada sila ketiga mengajarkan tentang sumpah pemuda, pada sila keempat mengajarkan mengenai sejarah pemilu 1966, 78aradigm dasar bagi pembangunan politik dan pemerintahan nasional, prinsip musyawarah mufakat, perwakilan, gotong royong, serta daulat rakyat (kerakyatan), yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi secara global, pada sila Kelima mengajarkan tentang resolusi PBB terhadap rakyat Palestina dan peluncuran BLT
2. Mendeskripsikan implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi pancasila melalui pembelajaran IPS pada kelas VII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso yakni setelah mempelajari IPS lebih memahami mengenai sejarah yang berkaitan dengan bangsa Indonesia yang menjadikan dan mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.

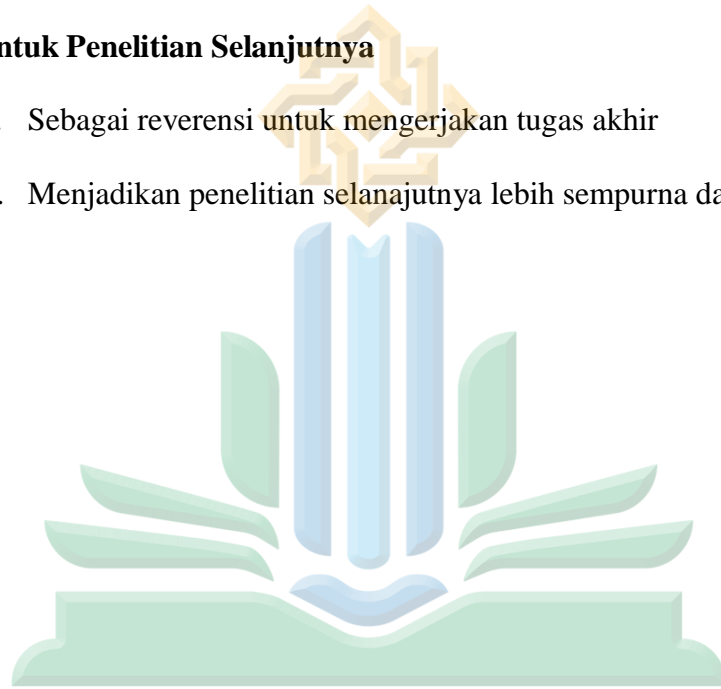
B. Saran

1. Untuk Guru

- a. Untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran
- b. Memiliki buku pedoman yang sesuai agar pembelajaran IPS sama seperti di sekolah lain. Tidak hanya berfokus pada inovasi diri sendiri

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Sebagai referensi untuk mengerjakan tugas akhir
- b. Menjadikan penelitian selanjutnya lebih sempurna dari penelitian ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo. Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Konstruktivistikme Dan VCT sebagai inovasi Pendekatan Pembelajaran Aktif. (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2012.
- Asbar. Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar. (Skripsi : Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar), 2019.
- Bagir, Zainal Abiding. Integrasi Ilmu Dan Agama. (Bandung : Mizan Pustaka), 2010.
- Cholisin & Nasiwan. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Yogyakarta : Ombak), 2012.
- Dahl. Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol. (Jakarta: Rajawali Pres), 1985.
- Effendi, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah). (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2014.
- Fadillah, dkk. Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS Sub Pokok Pluralitas (Studi Kasus di SMP Islam Terpadu Nuurushhidiiq Kota Cirebon). (Skripsi : IAIN Syekh Nurjati Cirebon), 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka), 2007.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Model-model Baru, terj. Tjetcep Rohidi. (Jakarta : UI-Press), 2014.
- Montoha. Hukum dan Kekuasaan Suatu Kajian Fiqh Siyasah, dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed), Hukum dan Kekuasaan. (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 1998.
- Mu'id, M. Toha. Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS di Kelas VIII SMP Negeri 1 Wilangan Kabupaten Nganjuk. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2021.
- Mulyana. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. (Bandung : Alfabeta), 2011.
- Muspiroh, Novianti. Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA. Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. Xxviii No. 3. 2013/1435.

- Nursa'ban, dkk. Buku Panduan Guru IPS Untuk SMP Kelas VII, Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Sosial. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan : Jakarta), 2021.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2008.
- Pratama, Siska. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran di Kelas V SDN 03 Negeri Batin Kec Blambangan Umpu, Kab Way Kanan. (Skripsi : UIN Lampung), 2020.
- Rahmah. Pengembangan Profesi Pendidikan IPS. (Bandung : Alfabeta), 2014.
- Rahmat, Hidayat Dudung. Hakikat dan Makna Nilai. (Bandung : Alfabeta), 2006), 7.
- Ruslan, Rosady. Metode Penelitian Public Dan Komunikasi. (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada), 2003.
- Rusman. Model-Model Pembelajaran mengembangkan profesional guru. (Jakarta : Rajawali Pers), 2014.
- Sagala, Syaiful. Konsep dan Makna Pembelajaran. (Bandung : Alfabexta), 2005.
- Sapriya. Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2009.
- Siregar, dkk. Teori Belajar dan Pembelajaran. (Bogor : Ghalia Indonesia), 2011.
- Soemantri, Numan. Menggagas pembaharuan pendidikan IPS. (Bandung : Remaja Rosdakarya), 2001.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. (Bandung : Alfabeta), 2018.
- Susanti, Septi Dewi. Integritas Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta. (Universitas Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial), 2017.
- Susanto, Ahmad. Teori Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta : Kencana), 2014.
- Syahrial. Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2010.
- Tilaar. Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani. (Bandung : Remaja Rosdakarya), 2002.

- Trianto. Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP. (Jakarta : Bumi Aksara), 2010.
- Ubaedillah. Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Demokrasi (Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani). (Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah), 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: PT Armas Duta Jaya), 2005.
- Wahidmurni. Metodologi Pembelajaran IPS Pengembangan Proses Pembelajaran IPS di Sekolah atau Madrasah. (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), 2017.
- Wahidmurni. Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (6), 67–72) 2017.
- Wijaya, Hengki dan Umrati. Analisis Data Kualitatif. (Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray), 2020.
- Yudi. Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan. Aktualitas Pancasila. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama). 2011.
- Zamroni. Meningkatkan Mutu Sekolah. (Jakarta : PSPA Muhammadiyah), 2007.
- Zamroni. Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural. (Yogyakarta : Gavin Kalam Utama), 2011.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ferli

Nim : T20189041

Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian atau karya ilmiah tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya milik orang lain atau dibuatkan orang lain. Kecuali secara tertulis yang dikutip sebagai referensi skripsi ini yang sudah disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada protes dari orang lain, maka saya bersedia memperbaiki tulisan saya dan meminta maaf kepada yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur-unsur paksaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Mei 2024

Saya menyatakan



Muhammad Ferli
NIM. T20189041

Lampiran 2

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Mengamati kondisi lingkungan sekolah
2. Mengamati proses pembelajaran IPS dikelas dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi pancasila.
3. Mengamati hasil belajar IPS siswa
4. Mengamati karakter siswa

B. Pedoman Wawancara

1. Untuk Kepala sekolah

- a. Apakah semua guru diwajibkan untuk membuat RPP?
- b. Mengapa para guru dianjurkan untuk selalu berinovasi dan berkreasi dalam proses pembelajaran saat mengajar?
- c. Apa fungsi dari inovasi tersebut?
- d. Bagaimana menurut bapak karakter siswa di sekolah ini?

2. Untuk Guru IPS

- a. Bagaimana bapak selama mengajar IPS disini?
- b. Apa yang bapak terapkan dalam pembelajaran IPS?
- c. Bagaimana integrasi nilai demokrasi dalam sila pertama pada pembelajaran IPS?
- d. Bagaimana integrasi nilai demokrasi dalam sila kedua pada pembelajaran IPS?
- e. Bagaimana integrasi nilai demokrasi dalam sila ketiga pada pembelajaran IPS?
- f. Bagaimana integrasi nilai demokrasi dalam sila keempat pada pembelajaran IPS?
- g. Bagaimana integrasi nilai demokrasi dalam sila kelima pada pembelajaran IPS?
- h. Apa saja implikasi yang ditimbulkan dengan adanya integrasi nilai demokrasi pancasila di pembelajaran IPS?

3. Untuk siswa

- a. Dalam sila pertama yang anda ketahui ada nilai demokrasi apa?
- b. Dalam sila kedua yang anda ketahui ada nilai demokrasi apa?
- c. Dalam sila ketiga yang anda ketahui ada nilai demokrasi apa?
- d. Dalam sila keempat yang anda ketahui ada nilai demokrasi apa?
- e. Dalam sila kelima yang anda ketahui ada nilai demokrasi apa?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Profil sekolah
2. Proses pembelajaran IPS
3. Foto-foto yang berkaitan

Lampiran 3

KALENDER AKADEMIK

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028 Fax. (0331) 421152

**KALENDER PENDIDIKAN UNTUK PAUD, SD, DAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

JULI 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

AGUSTUS 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

SEPTEMBER 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

OKTOBER 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NOVEMBER 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

DESEMBER 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JANUARI 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

FEBRUARI 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

MARET 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

MEI 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JUNI 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: [www.http://ftik.uinkhas-jember.ac.id](http://ftik.uinkhas-jember.ac.id) Email: tarbiyah.iainjember@gmail.com

Nomor : B-5137/ln.20/3.a/PP.009/12/2023

Sifat : Biasa

Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala MTS lombok kulon
Jln. Trunojoyo lombok kulon wonosari, bondowoso

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

NIM : T20189041
Nama : MUHAMMAD FERLI
Semester : Semester sebelas
Program Studi : TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "INTEGRASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMBELAJARAN IPS MATERI SEJARAH DI MTS LOMBOK KULON TAHUN AJARAN 2024/2025" selama 15 (lima belas) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu Imammudin S, Pd,I

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 21 Desember 2023

Dekan,

[Signature]
HOTOIBUL UMAM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5

SURAT SELESAI PENELITIAN

**MADRASAH TSANAWIYAH**
MTSS LOMBOK KULON WONOSARI
Status : TERAKREDITASI B
(NPSN : 20581795 NSM : 121235110076)
Email : mts.lombokkulon@gmail.com Website : <https://mts.lombokkulon.blogspot.com/>
Jln. Trunojoyo No 25 Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso (68282) Jawa Timur

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 0509/MTSS.LK/034/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMAMUDDIN, S.Pd.I**
NIP :
Jabatan : Kepala Madrasah MTSS Lombok Kulon
Alamat : Lombok Kulon Wonosari Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FERLI**
NIM : T20189041
Semester : 12
Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Tarbiyah Ilmu dan Keguruan

Benar-benar telah melakukan penelitian di MTSS Lombok Kulon dengan "Penerapan Strategi Problem Based Learning (PBL) pada Mata Pelajaran IPS di MTSS Lombok Kulon Tahun Pelajaran 2022/2023" mulai tanggal 16 Maret 2023 s/d Juni 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 24 Mei 2024
Kepala Madrasah,


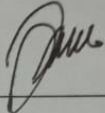






**IMAMUDDIN, S.Pd.I**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 6

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DI MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Rabu, 8 November 2023	Observasi Pra Penelitian	
2.	Kamis, 21 Desember 2023	Penyerahan surat izin penelitian	
3.	Sabtu, 20 April 2024	Wawancara dengan Kepala Madrasah (Bapak Imamudin)	
4.	Senin, 22 April 2024	Wawancara dengan Guru IPS (Bapak Yulianto)	
5.	Selasa, 23 April 2024	Wawancara dengan siswa	
6.	Selasa, 23 April 2024	Observasi	
7.	Selasa, 23 April 2024	Dokumentasi	
8.	Sabtu, 25 April 2024	Mengambil surat izin penelitian	

J E M B E R

Bondowoso, 25 April 2024



Lampiran 7

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variable	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Peneltian
Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VII MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso	1. Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Sila-Sila Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia 	<ol style="list-style-type: none"> Informan <ol style="list-style-type: none"> Kepala Madrasah Tsanawiyah Lombok Kulon Wonosari Bondowoso Guru Siswa Kepustakaan Dokumenta si 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian: Metode Kualitatif Jenis Penelitian: Penelitian Lapangan (<i>Field Reseach</i>) Lokasi Penelitian: "MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso" Subjek Penelitian: Purposive Sampling Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observas Wawancara Dokumentasi Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan Data Kondensasi Data Penyajian Data 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS pada kelas VIII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso? Bagaimana implikasi dari integrasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS pada kelas VIII di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso?

	<p>2. Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Pembelajaran IPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkebhinekaan • Gotong Royong • Mandiri • Bernalar Kritis • Mengedepankan ide-ide yang diterapkan dalam kehidupan • Pembelajaran yang terintegrasi • Pembelajaran yang berbasis pada nilai • Pembelajaran yang mencapai tujuannya dan pembelajaran aktif. 	<ul style="list-style-type: none"> d. Kesimpulan 7. Keabsahan Data: <ul style="list-style-type: none"> a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Metode 8. Tahap Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Penyusunan d. Laporan 	
--	------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Lampiran 8

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Guru IPS



Wawancara dengan Kepala Sekolah



Proses review pembelajaran



Wawancara dengan siswa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 9

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Ferli
NIM : T20189041
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 29 April 1999
Agama : Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Tadris Ilmu Pendidikan Sosial
Alamat : Lombok Wetan Rt. 10 Rw. 04 Wonosari
No. Hp : 082146787145
E-mail : ferlybolang70@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2. SD Negeri Lombok Kulon 1 : 2006 - 2012
3. SMP Negeri 1 Tapen : 2012 - 2015
4. SMA Negeri 1 Tapen : 2015 - 2018
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2018 - 2024

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pencak Silat : 2012 - 2018
2. HMPS IPS : 2018 - 2024